

## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Biro Umum Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014, Peraturan Gubernur No. 68 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, terbaru Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Sisten dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Biro Umum Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Biro Umum Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Banten Nomor 94);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
21. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
22. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten. Terakhir Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2021.

### **1.3 Organisasi Perangkat Daerah Biro Umum**

Pada tahun 2021 Biro Umum Provinsi Banten dipimpin oleh Kepala Biro, Struktur Organisasi terlampir

### **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

## BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

## BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

## BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

## BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

## BAB VII. PENUTUP

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2021 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten mendapatkan alokasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 191.918.631.370,00, dimana keseluruhan Anggaran dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 122.839.798.610,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 59.341.745.810,00. Sedangkan alokasi Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp. 9.737.086.950,00, dimana alokasi anggaran diperuntukkan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 2.216.253.950,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 7.483.860.000,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 36.973.000,00.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 158.997.034.067,00 atau 87,27% dari Anggaran sebesar Rp 182.181.544.420,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 8.295.149.856,00 atau 85,19 % dari anggaran sebesar Rp. 9.737.086.950,00.

#### **2.2. Hambatan dan Kendala**

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun ada beberapa hal terkait realisasi keuangan yang tidak mencapai target ( $\leq 80\%$ ) dikarenakan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - . Gaji dan Tunjangan dibayarkan sesuai Jumlah ASN
    - . Kekosongan Pejabat Struktural
    - . TAPERA tidak Dapat direalisasikan dikarenakan dasar hukum belum
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - . Penganggaran dianggarkan berdasarkan output per SPK namun pada pelaksanaannya dibayarkan bulanan dan honorarium dibayarkan berdasarkan realisasi pengadaan Barang dan Jasa
2. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
  - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
    - . Efisiensi
3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
    - . Efisiensi
4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- . Realsasi berdasarkam permohonan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - . belanja e-book tidak direalisasikan karena tidak adanya perpustakaan digital/smart library
    - . pemeliharaan buku (kantong buku, kartu buku) tidak terserap karena kurangnya SDM pengelola perpustakaan
5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - . Terdapat pengadaan barang yang sudah tidak tersedia (discontinue)
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - . Pengadaan ruangan sound tidak direalisasikan karena revitalisasi pendopo lama belum selesai dilaksanakan
6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - . Realisasi menyesuaikan dengan permohonan fasilitasi
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    - . Realisasi belanja menyesuaikan dengan jumlah & kehadiran pegawai
7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - . Realisasi belanja perawatan kendaraan dinas dan penggantian suku cadang berdasarkan pengajuan pemeliharaan dari masing-masing pemegang kendaraan dinas.
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - . Belanja BBM genset menyesuaikan kebutuhan
    - . Belanja servis genset berdasarkan kebutuhan servis
    - . Terdapat selisih harga BBM antara DPA dan harga pembelian
    - . Efisiensi pemeliharaan APK
8. ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - . Medical check up tidak diserap karena tidak sesuai dengan Rumah Sakit yang menjadi rujukan Pak Gubernur
  - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - . Perjalanan Dinas ke Provinsi Papua tidak di realisasikan karena telah difasilitasi dari KONI Provinsi Banten.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Pergub No. 18 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.

#### **3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

### **3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah**

#### **a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan OPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

**b. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
  - c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
  - d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

\*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
    - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
    - bertambah volume; dan/atau
    - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
  - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
  - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di

atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
  - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
  - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
  - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:

a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (OPD) atau dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (OPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

(09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

(10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.

(11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD

(12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD

(13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan

untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

**e. Kebijakan Akuntansi Beban**

- (01) Beban diakui pada saat:
  - a) timbulnya kewajiban;
  - b) terjadinya konsumsi aset;
  - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

**f. Kebijakan Akuntansi Aset**

- (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
  - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang di atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 ( tiga ) tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang di atas 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 5 ( lima ) tahun; dan/atau
  - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
  - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
  - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (13) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
  - b) Amunisi;
  - c) Bahan untuk pemeliharaan;
  - d) Suku cadang;
  - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
  - f) Pita cukai dan leges;
  - g) Bahan baku ;
  - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - k) Barang cetakan;
  - l) Perangko dan materai;
  - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
  - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stockopname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
  - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - b) Metode ekuitas;
 

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
  - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
  - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
    - 2) Alat-alat angkutan
    - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
    - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
    - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
    - 6) Alat studio dan alat komunikasi
    - 7) Alat-alat kedokteran
    - 8) Alat-alat laboratorium
    - 9) Alat keamanan
  - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) Bangunan gedung
    - 2) Bangunan monumen
  - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) Jalan dan jembatan

- 2) Bangunan air/irigasi
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Buku dan perpustakaan
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
- 4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa OPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh OPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

(35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

(36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

(37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkan Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	

	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan

- akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
    - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
    - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
    - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
  - (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
    - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
    - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
  - (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
  - (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
    - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
    - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
  - (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

**g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 4.1.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Biro Umum pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 167.292.183.932,00 atau 87,17% dari anggaran belanja sebesar Rp. 191.918.631.370,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Realisasi Belanja Biro Umum Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021**

Uraian	APBD Murni Tahun 2021 Rp.	Perubahan APBD Tahun 2021 Rp.	Realisasi Tahun 2021		Selisih Kurang/(Lebih) Rp.
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6=3-4
<b>BELANJA</b>	<b>177.328.842.470,00</b>	<b>191.918.629.370,00</b>	<b>167.292.183.932,00</b>	<b>87,17</b>	<b>24.626.445.438,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>162.734.118.220,00</b>	<b>182.181.542.420,00</b>	<b>158.997.034.076,00</b>	<b>87,27</b>	<b>23.184.508.344,00</b>
Belanja Pegawai	106.730.356.470,00	122.839.796.610,00	106.885.706.631,00	87,01	15.954.089.979,00
Belanja Pegawai	106.730.356.470,00	122.839.796.610,00	106.885.706.631,00	87,01	15.954.089.979,00
Belanja Barang dan Jasa	56.003.761.750,00	59.341.745.810,00	52.111.327.445,00	87,82	7.230.418.365,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>14.594.724.250,00</b>	<b>9.737.086.950,00</b>	<b>8.295.149.856,00</b>	<b>85,19</b>	<b>1.441.937.094,00</b>
Belanja Modal Peralatan mesin	7.073.891.250,00	2.216.253.950,00	1.725.797.800,00	77,87	490.456.150,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.483.860.000,00	7.483.860.000,00	6.534.794.556,00	87,32	949.065.444,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.973.000,00	36.973.000,00	34.557.500,00	93,47	2.415.500,00
					-
					-
<b>JUMLAH</b>	<b>177.328.842.470,00</b>	<b>191.918.629.370,00</b>	<b>167.292.183.932,00</b>	<b>87,17</b>	<b>24.626.445.438,00</b>

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 dengan Capaian Realisasi sebesar 94,03%, Realisasi Belanja TA. 2021 mengalami Penurunan, Capaian Realisasi Tahun 2021 sebesar 87,71%.

**Tabel 2**  
**Realisasi Belanja Biro Umum Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020**

Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Selisih Realisasi TA.2021 Terhadap TA.2020	Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
<b>BELANJA</b>	<b>167.292.183.932,00</b>	<b>125.663.780.451,00</b>	<b>41.628.403.481,00</b>	<b>0,33</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>158.997.034.076,00</b>	<b>122.318.477.121,00</b>	<b>36.678.556.955,00</b>	<b>0,30</b>
Belanja Pegawai	106.885.706.631,00	91.780.864.444,00	15.104.842.187,00	0,16
Belanja Barang dan Jasa	52.111.327.445,00	30.537.612.677,00	21.573.714.768,00	0,71
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.295.149.856,00</b>	<b>3.345.303.330,00</b>	<b>4.949.846.526,00</b>	<b>1,48</b>
Belanja Peralatan dan Mesin	1.725.797.800,00	2.892.424.670,00	(1.166.626.870,00)	(0,40)
Belanja Gedung dan Bangunan	6.534.794.556,00	413.978.660,00	6.120.815.896,00	14,79
Belanja Aset Tetap Lainnya	34.557.500,00	38.900.000,00	(4.342.500,00)	(0,11)
<b>JUMLAH</b>	<b>167.292.183.932,00</b>	<b>125.663.780.451,00</b>	<b>41.628.403.481,00</b>	<b>0,33</b>

#### 4.1.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 158.997.034.076,00 atau 87,27% dari anggaran sebesar Rp. 182.181.544.420,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 122.318.477.121,00 atau 93,91% dari anggaran sebesar Rp. 130.245.268.519,00, realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 bertambah sebesar Rp. 36.678.556.955,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

##### 4.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 106.885.706.631,00 atau 87,01% dari anggaran sebesar Rp. 122.839.798.610,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 91.780.864.444,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp. 95.445.000,00, realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 mengalami bertambah sebesar Rp. 15.104.842.187,00, atau mengalami kenaikan sebesar 0,16%.

##### 4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 52.111.327.445,00 atau 87,82% dari anggaran sebesar Rp. 59.341.745.810,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 30.537.612.677,00 atau 87,75% dari anggaran sebesar Rp. 34.800.268.519,00, realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021

bertambah sebesar Rp. 21.573.714.768,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,71%.

#### **4.1.1.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 8.295.149.856,00 atau 85,19% dari anggaran sebesar Rp. 9.737.086.950,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.345.303.330,00,00 atau 90,29% dari anggaran sebesar Rp. 3.394.995.000,00, realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 bertambah sebesar Rp. 4.949.846.526,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,48%.

##### **4.1.1.2.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 00 dan Rp. 00. Hal ini dikarenakan memang tidak ada Belanja modal Tanah di Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggran 2021.

##### **4.1.1.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.725.797.800,00 atau 77,87% dari Anggaran sebesar Rp. 2.216.253.950,00. Dibandingkan dengan realisari Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.892.424.670,00 atau 98,90% dari Anggaran sebesar Rp. 2.924.495,00, realisasi Belanja modal Peralatan dan mesin berkurang sebesar Rp. 1.166.626.870,00 atau mengalami penurunan 0,40%.

##### **4.1.1.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 6.534.794.556,00 atau 87,32% dari Anggaran sebesar Rp. 7.483.860.000,00. Dibandingkan dengan realisari Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 413.978.660,00 atau 96,16% dari Anggaran sebesar Rp. 430.500.000,00, realisasi Belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.120.815.896,00 atau 14,79%.

##### **4.1.1.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sudah tidak terdapat belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

#### 4.1.1.2.6 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 34.557.500,00 atau 93,47% dari Anggaran sebesar Rp. 36.973.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 38.900.000,00 atau 97,25% dari Anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00, realisasi Belanja Aset tetap lainnya berkurang sebesar Rp. 4.342.500,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,11%.

### 4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

#### 4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,-.

#### 4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 169.174.059.013,00 sedangkan beban LO pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 169.422.160.983,00. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2021	Thn 2020
		Rp	Rp
1	2	3	4
	<b>Beban</b>	<b>169.174.059.013,00</b>	<b>13.411.753.150.699,00</b>
	- Belanja Pegawai	106.885.706.631,00	9.177.796.882.500,00
	- Beban Persediaan	7.338.375.075,00	198.949.790.000,00
	Beban Jasa	33.975.740.872,59	2.131.440.937.243,00
	Beban Pemeliharaan	7.244.481.313,00	620.053.649.500,00
	Beban Perjalanan Dinas	2.530.627.446,00	85.042.744.400,00
	Beban Penyusutan	11.181.992.310,82	1.194.545.188.723,00
	Beban Amortisasi	17.135.364,59	3.923.958.333,00

#### 4.2.3 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2021 adalah sebesar Rp.0, sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp.0,-

Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2021	Thn 2020
		Rp	Rp
1	2	3	4
	Defisit Non Operasional		
	- Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	0	0

#### 4.2.4 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp.0,-. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru dimulai Tahun 2013 Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Thn 2021	Thn 2020	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa				
	- Beban Luar Biasa	0	0	0	0

### 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

#### 4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.720.000,00 dan Rp. 95.040.700,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Sisa kas tahun anggaran 2020 merupakan uang pengembalian temuan LHP yang di setorkan di tahun anggaran 2021. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	Th 2021	Th 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	6.720.000	95.040.700
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

#### 4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

##### *Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

Keterangan	Thn 2021	Thn 2020
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

#### 4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Jenis	Th 2021	Th 2020
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	-	-
Pajak yang belum disetor	-	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke Kas Daerah	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

#### 4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 212.325.995,40 dan Rp. 373.003.941,99. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Yaitu belanja dibayar dimuka : sewa gudang dan premi Asuransi

#### 4.3.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

#### 4.3.6 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 212.325.995,40, yang terdiri dari belanja Premi Asuransi dan belanja sewa Gudang. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada Belanja Dibayar Dimuka Tahun ini terdapat kelebihan Pembayaran Sewa Bangunan Gedung Kantor (SPK) Nomor 027/26910743/SPK/URDAL/UM/21, tanggal 08 Februari dan (SPK) Nomor 027/26910673/SPK/URDAL/UM/21, Penyedia Barang/Jasa Retmi Nainggolan sebesar Rp. 5.909.092,00

*Rincian Belanja Dibayar di Muka*

<b>Keterangan</b>	<b>Thn 2021</b>
Premi Asuransi	152.353.704,11
Sewa Gudang	59.972.291,29
<b>JUMLAH</b>	<b>212.325.995,40</b>

#### **4.3.7 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 pada Biro Umum setelah dilakukan stock opname oleh inspektorat adalah sebesar Rp. 490.401.175.00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**RINCIAN DROPING PERSEDIAAN**

<b>SKPD</b>	<b>ATK</b>	<b>CETAKAN</b>	<b>LAINNYA</b>	<b>JUMLAH</b>
B. HUKUM	2.519.800	25.375.000,00		27.894.800,00
B. ORGANISASI	28.547.400	6.225.000,00		34.772.400,00
B. BINA PEREKONOMIAN	29.822.800	17.630.000,00		47.452.800,00
B. PEMERINTAHAN	21.910.900	9.650.000,00		31.560.900,00
B. ADPEM	39.059.000	18.630.450,00		57.689.450,00
B. PENGADAAN BARANG/JASA	20.382.300	23.960.000,00		44.342.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>142.242.200</b>	<b>101.470.450,00</b>	<b>-</b>	<b>243.712.650,00</b>

#### **4.3.8 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 477.915.613.897,00.

#### **4.3.9 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 132.823.642.531,48 dan Rp. 134.414.605.815,28.

#### **4.3.10 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 148.745.822.471,60 dan Rp. 142.723.173.285,60.

#### **4.3.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.268.706.469,98 dan Rp. 5.300.506.269,98.

#### **4.3.12 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 5.973.457.413,41 dan Rp. 5.865.024.689,41.

#### **4.3.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 214.300.900 dan Rp. 214.300.900,00. nilai Kontruksi Dalam Pembangunan adalah Biaya Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Setda lama / Pendopo Lama dan Penataan Pos Jaga dilingkungan Setda. Dengan uraian sebagai berikut :

<b>Rincian</b>	<b>Nilai</b>
Jasa Konsultansi Penataan Pos Jaga dilingkungan Setda	24.508.000
Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Kawasan Setda Lama /Pendopo Lama	189.792.900
<b>TOTAL</b>	<b>214.300.900</b>

#### **4.3.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 194.267.565.424,68 dan Rp. 184.853.469.293,60. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

#### **4.3.15 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 49.538.385,42 dan Rp. 34.031.250,01 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

#### **4.3.16 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 2.650.648.035,81 dan Rp. 1.594.829.535,83. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat atau tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-
<b>ASET LAIN-LAIN BRUTO</b>	<b>8.550.468.555,00</b>
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	5.899.820.519,19
	-
	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>2.650.648.035,81</b>

#### **4.3.17 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Yang merupakan kewajiban tagihan bpjs dan telah diselesaikan.

#### **4.3.18 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

#### **4.3.19 Utang Belanja**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 218.396.123,00 dan Rp. 150.000.833,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Yang merupakan kewajiban tagihan PLN dan Jasa Telekomunikasi bulan Desember tahun 2021.

#### **4.3.19 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 580.865.215.727,42 dan Rp. 583.757.572.158,50. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

##### BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN

##### Laporan Perubahan Ekuitas

##### Untuk Periode Yang Berakhir

##### Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

NO.	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
1	EKUITAS AWAL	583.757.572.158,50	592.720.009.178,49
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(169.174.059.013,00)	(134.117.531.506,99)
3	RK/PPKD	167.197.143.232,00	125.663.780.451,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	(915.440.650,08)	(508.685.964,00)
5	Koreksi Nilai Persediaan		
6	Koreksi Aset Tetap	1.171.031.523,94	(287.707.564,00)
7	Koreksi Aset lainnya	(2.636.704.005,02)	
8	lain-lain	550.231.831,00	(220.978.400,00)
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>580.865.215.727,42</b>	<b>583.757.572.158,50</b>

## **BAB V**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN**

Sekretariat Daerah Provinsi Banten beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang, Dasar pembentukan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan Perda tersebut Sekretariat daerah Provinsi Banten mempunyai 3 (tiga) Asisten Daerah yaitu: (1). Asisten Daerah Tata Praja; (2). Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan (3). Asisten Daerah Administrasi Umum.

Asisten Daerah Tata Praja mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Asisten Daerah Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang umum, perlengkapan, aset, hubungan masyarakat dan protokol serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Biro Umum Setda Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.



**PROVINSI BANTEN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO UMUM**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

PERIODE : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021

HAL: 1 / 7

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
<b>8</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>	
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>157.974.931.337,59</b>
<b>8.1.01</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>106.885.706.631,00</b>
<b>8.1.01.01</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>27.584.208.422,00</b>
<b>8.1.01.01.01</b>	<b>Beban Gaji Pokok ASN</b>	<b>19.642.676.700,0</b>
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	19.642.676.700,00
<b>8.1.01.01.02</b>	<b>Beban Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>1.941.381.716,00</b>
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.941.381.716,00
<b>8.1.01.01.03</b>	<b>Beban Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>1.277.335.000,00</b>
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	1.277.335.000,00
<b>8.1.01.01.04</b>	<b>Beban Tunjangan Fungsional ASN</b>	<b>481.824.000,00</b>
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	481.824.000,00
<b>8.1.01.01.05</b>	<b>Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>654.915.000,00</b>
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	654.915.000,00
<b>8.1.01.01.06</b>	<b>Beban Tunjangan Beras ASN</b>	<b>1.121.134.020,00</b>
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	1.121.134.020,00
<b>8.1.01.01.07</b>	<b>Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>41.393.410,00</b>
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.393.410,00
<b>8.1.01.01.08</b>	<b>Beban Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>262.062,00</b>
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	262.062,00
<b>8.1.01.01.09</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>2.261.698.762,00</b>
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.261.698.762,00
<b>8.1.01.01.10</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>40.397.694,00</b>
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	40.397.694,00
<b>8.1.01.01.11</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>121.190.058,00</b>
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	121.190.058,00
<b>8.1.01.02</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>66.874.500.238,00</b>
<b>8.1.01.02.01</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>66.730.500.238,0</b>
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	66.730.500.238,00
<b>8.1.01.02.03</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN</b>	<b>144.000.000,00</b>
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	144.000.000,00
<b>8.1.01.03</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>2.036.692.500,00</b>
<b>8.1.01.03.07</b>	<b>Beban Honorarium</b>	<b>1.885.992.500,00</b>
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.599.472.500,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	286.520.000,00
<b>8.1.01.03.08</b>	<b>Beban Jasa Pengelolaan BMD</b>	<b>150.700.000,00</b>
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	150.700.000,00
<b>8.1.01.05</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>239.146.771,00</b>

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
<b>8.1.01.05.01</b>	<b>Beban Gaji Pokok KDH/WKDH</b>	<b>75.600.000,00</b>
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
<b>8.1.01.05.02</b>	<b>Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH</b>	<b>8.904.000,00</b>
8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.904.000,00
<b>8.1.01.05.03</b>	<b>Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH</b>	<b>136.080.000,00</b>
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
<b>8.1.01.05.04</b>	<b>Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH</b>	<b>6.083.280,00</b>
8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
<b>8.1.01.05.05</b>	<b>Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH</b>	<b>4.396.611,00</b>
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.396.611,00
<b>8.1.01.05.06</b>	<b>Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH</b>	<b>1.600,00</b>
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.600,00
<b>8.1.01.05.07</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH</b>	<b>7.588.800,00</b>
8.1.01.05.07.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.588.800,00
<b>8.1.01.05.08</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH</b>	<b>142.560,00</b>
8.1.01.05.08.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	142.560,00
<b>8.1.01.05.09</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH</b>	<b>349.920,00</b>
8.1.01.05.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	349.920,00
<b>8.1.01.06</b>	<b>Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>10.151.158.700,00</b>
<b>8.1.01.06.02</b>	<b>Beban Dana Operasional KDH/WKDH</b>	<b>10.151.158.700,00</b>
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	10.151.158.700,00
<b>8.1.02</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>51.084.866.706,59</b>
<b>8.1.02.01</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>17.307.808.575,00</b>
<b>8.1.02.01.01</b>	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>17.307.808.575,00</b>
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.500.000,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	587.420.000,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	39.240.000,00
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	35.768.000,00
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.375.000,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.282.606.780,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	98.284.900,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.050.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	388.564.395,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	733.803.000,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	345.880.500,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	95.475.000,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	29.775.000,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.507.783.000,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	92.873.500,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.757.095.000,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	284.881.000,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	928.585.000,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.210.764.500,00

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	767.050.000,00
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.500.000,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.500.000,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.784.000,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	7.750.000,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	15.500.000,00
<b>8.1.02.02</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>24.001.949.372,59</b>
<b>8.1.02.02.01</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>21.656.319.427,0</b>
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.650.000,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.859.260.000,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	10.000.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.981.230.000,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.766.532.500,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.843.605.000,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	845.260.000,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	416.096.000,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	189.440.000,00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	32.800.000,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	80.000.000,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.226.420.711,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	191.956.500,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	129.788.716,00
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	17.280.000,00
<b>8.1.02.02.02</b>	<b>Beban Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>855.790.503,33</b>
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	283.001.034,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.441.557,00
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	530.347.912,33
<b>8.1.02.02.04</b>	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>304.590.500,00</b>
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.800.000,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	86.734.500,00
8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	68.651.000,00
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.540.000,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	62.865.000,00
<b>8.1.02.02.05</b>	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>628.232.942,26</b>
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	215.663.137,26
8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang	108.294.805,00
8.1.02.02.05.0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.600.000,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	291.675.000,00
<b>8.1.02.02.07</b>	<b>Beban Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>267.326.000,00</b>
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	267.326.000,00
<b>8.1.02.02.08</b>	<b>Beban Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>0,00</b>

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.1.02.02.08.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00
<b>8.1.02.02.09</b>	<b>Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>191.690.000,00</b>
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	94.019.000,00
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	97.671.000,00
<b>8.1.02.02.12</b>	<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>98.000.000,00</b>
8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	98.000.000,00
<b>8.1.02.03</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>7.244.481.313,00</b>
<b>8.1.02.03.02</b>	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>5.574.961.573,00</b>
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.451.049.223,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	271.186.100,00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	416.442.700,00
8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	18.815.500,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.003.050,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	64.405.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	173.328.000,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.250.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	81.482.000,00
<b>8.1.02.03.03</b>	<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.646.869.740,00</b>
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.421.107.160,00
8.1.02.03.03.0013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	28.078.200,00
8.1.02.03.03.0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	197.684.380,00
<b>8.1.02.03.05</b>	<b>Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>22.650.000,00</b>
8.1.02.03.05.0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	7.500.000,00
8.1.02.03.05.0002	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	4.575.000,00
8.1.02.03.05.0003	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	4.650.000,00
8.1.02.03.05.0004	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	4.425.000,00
8.1.02.03.05.0012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00
<b>8.1.02.04</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>2.530.627.446,00</b>
<b>8.1.02.04.01</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>	<b>2.530.627.446,00</b>
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.307.972.468,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.222.654.978,00
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomptabel</b>	<b>4.358.000,00</b>
<b>8.1.08.01</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomptabel</b>	<b>4.358.000,00</b>
<b>8.1.08.01.01</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomptabel</b>	<b>4.358.000,00</b>
8.1.08.01.01.0001	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	4.358.000,00
<b>8.2</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>11.199.127.675,41</b>
<b>8.2.01</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.609.679.112,12</b>
<b>8.2.01.01</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Besar</b>	<b>205.866.744,17</b>
<b>8.2.01.01.03</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Bantu</b>	<b>205.866.744,17</b>
8.2.01.01.03.0004	Beban Penyusutan Electric Generating Set	132.993.162,50
8.2.01.01.03.0005	Beban Penyusutan Pompa	72.873.581,67
<b>8.2.01.02</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Angkutan</b>	<b>1.567.407.772,24</b>
<b>8.2.01.02.01</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>1.567.407.772,24</b>

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.2.01.02.01.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	735.879.690,94
8.2.01.02.01.0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	700.008.133,50
8.2.01.02.01.0003	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	123.476.202,26
8.2.01.02.01.0004	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.588.250,00
8.2.01.02.01.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel	455.495,54
<b>8.2.01.03</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>7.075.833,33</b>
<b>8.2.01.03.03</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Ukur</b>	<b>7.075.833,33</b>
8.2.01.03.03.0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	1.966.250,00
8.2.01.03.03.0007	Beban Penyusutan Universal Tester	3.922.083,33
8.2.01.03.03.0010	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	1.187.500,00
<b>8.2.01.04</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Pertanian</b>	<b>13.823.171,80</b>
<b>8.2.01.04.01</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Pengolahan</b>	<b>13.823.171,80</b>
8.2.01.04.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	13.823.171,80
<b>8.2.01.05</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1.272.313.962,71</b>
<b>8.2.01.05.01</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Kantor</b>	<b>305.158.336,50</b>
8.2.01.05.01.0003	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.965.625,00
8.2.01.05.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	220.377.619,06
8.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	73.815.092,44
<b>8.2.01.05.02</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga</b>	<b>841.165.704,13</b>
8.2.01.05.02.0001	Beban Penyusutan Mebel	414.358.358,08
8.2.01.05.02.0003	Beban Penyusutan Alat Pembersih	19.479.775,00
8.2.01.05.02.0004	Beban Penyusutan Alat Pendingin	158.657.687,50
8.2.01.05.02.0005	Beban Penyusutan Alat Dapur	3.882.725,00
8.2.01.05.02.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.324.658,55
8.2.01.05.02.0007	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	7.462.500,00
<b>8.2.01.05.03</b>	<b>Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>125.989.922,08</b>
8.2.01.05.03.0001	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	15.767.372,08
8.2.01.05.03.0002	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	35.526.175,00
8.2.01.05.03.0003	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	12.387.500,00
8.2.01.05.03.0004	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	30.975.000,00
8.2.01.05.03.0006	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	28.912.500,00
8.2.01.05.03.0007	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	2.421.375,00
<b>8.2.01.06</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>145.906.223,72</b>
<b>8.2.01.06.01</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Studio</b>	<b>97.567.755,00</b>
8.2.01.06.01.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	87.852.705,00
8.2.01.06.01.0002	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	9.715.050,00
<b>8.2.01.06.02</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Komunikasi</b>	<b>48.338.468,72</b>
8.2.01.06.02.0001	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	48.338.468,72
<b>8.2.01.08</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Laboratorium</b>	<b>3.562.500,00</b>
<b>8.2.01.08.01</b>	<b>Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium</b>	<b>3.562.500,00</b>
8.2.01.08.01.0051	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	3.562.500,00
<b>8.2.01.09</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Persenjataan</b>	<b>6.054.158,33</b>
<b>8.2.01.09.02</b>	<b>Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api</b>	<b>6.054.158,33</b>

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.2.01.09.02.0002	Beban Penyusutan Non Senjata API -non senjata Api	6.054.158,33
<b>8.2.01.10</b>	<b>Beban Penyusutan Komputer</b>	<b>377.718.745,82</b>
<b>8.2.01.10.01</b>	<b>Beban Penyusutan Komputer Unit</b>	<b>199.169.312,48</b>
8.2.01.10.01.0002	Beban Penyusutan Personal Computer	199.169.312,48
<b>8.2.01.10.02</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan Komputer</b>	<b>178.549.433,34</b>
8.2.01.10.02.0001	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	2.112.500,00
8.2.01.10.02.0002	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	11.160.000,00
8.2.01.10.02.0003	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	151.661.933,34
8.2.01.10.02.0004	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	13.615.000,00
<b>8.2.01.15</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>8.2.01.15.03</b>	<b>Beban Penyusutan Alat SAR</b>	<b>2.500.000,00</b>
8.2.01.15.03.0002	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	2.500.000,00
<b>8.2.01.19</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan Olahraga</b>	<b>7.450.000,00</b>
<b>8.2.01.19.01</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan Olahraga</b>	<b>7.450.000,00</b>
8.2.01.19.01.0002	Beban Penyusutan Peralatan Permainan	7.450.000,00
<b>8.2.02</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>7.087.362.495,24</b>
<b>8.2.02.01</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Gedung</b>	<b>7.044.464.345,24</b>
<b>8.2.02.01.01</b>	<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>6.181.574.127,64</b>
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	5.961.552.148,89
8.2.02.01.01.0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	18.553.168,00
8.2.02.01.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.410.000,00
8.2.02.01.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	9.181.400,00
8.2.02.01.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7.425.000,00
8.2.02.01.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	27.185.200,00
8.2.02.01.01.0036	Beban Penyusutan Taman	7.898.745,50
8.2.02.01.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	146.368.465,25
<b>8.2.02.01.02</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal</b>	<b>862.890.217,60</b>
8.2.02.01.02.0001	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	861.014.067,60
8.2.02.01.02.0003	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	1.876.150,00
<b>8.2.02.04</b>	<b>Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>42.898.150,00</b>
<b>8.2.02.04.01</b>	<b>Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas</b>	<b>42.898.150,00</b>
8.2.02.04.01.0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	8.751.950,00
8.2.02.04.01.0004	Beban Penyusutan Pagar	34.146.200,00
<b>8.2.03</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>376.407.873,46</b>
<b>8.2.03.01</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan</b>	<b>173.102.700,00</b>
<b>8.2.03.01.01</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan</b>	<b>173.102.700,00</b>
8.2.03.01.01.0009	Beban Penyusutan Jalan Khusus	173.102.700,00
<b>8.2.03.02</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Air</b>	<b>63.305.010,00</b>
<b>8.2.03.02.01</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi</b>	<b>7.450.000,00</b>
8.2.03.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	7.450.000,00
<b>8.2.03.02.04</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Pengaman</b>	<b>18.840.000,00</b>
8.2.03.02.04.0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	18.840.000,00
<b>8.2.03.02.05</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah</b>	<b>29.570.010,00</b>
8.2.03.02.05.0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	29.570.010,00
<b>8.2.03.02.07</b>	<b>Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor</b>	<b>7.445.000,00</b>

No	Uraian	Tahun 2021
1	2	3
8.2.03.02.07.0005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	7.445.000,00
<b>8.2.03.03</b>	<b>Beban Penyusutan Instalasi</b>	<b>58.155.664,96</b>
<b>8.2.03.03.01</b>	<b>Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku</b>	<b>1.931.050,00</b>
8.2.03.03.01.0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	1.931.050,00
<b>8.2.03.03.05</b>	<b>Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik</b>	<b>10.014.999,96</b>
8.2.03.03.05.0009	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	10.014.999,96
<b>8.2.03.03.06</b>	<b>Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik</b>	<b>32.574.015,00</b>
8.2.03.03.06.0001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	27.803.515,00
8.2.03.03.06.0003	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	4.770.500,00
<b>8.2.03.03.09</b>	<b>Beban Penyusutan Instalasi Pengaman</b>	<b>13.635.600,00</b>
8.2.03.03.09.0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	13.635.600,00
<b>8.2.03.04</b>	<b>Beban Penyusutan Jaringan</b>	<b>81.844.498,50</b>
<b>8.2.03.04.01</b>	<b>Beban Penyusutan Jaringan Air Minum</b>	<b>9.968.691,00</b>
8.2.03.04.01.0001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	9.968.691,00
<b>8.2.03.04.02</b>	<b>Beban Penyusutan Jaringan Listrik</b>	<b>51.265.457,50</b>
8.2.03.04.02.0001	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	47.277.957,50
8.2.03.04.02.0002	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	3.987.500,00
<b>8.2.03.04.03</b>	<b>Beban Penyusutan Jaringan Telepon</b>	<b>20.610.350,00</b>
8.2.03.04.03.0001	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah	20.610.350,00
<b>8.2.04</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>108.542.830,00</b>
<b>8.2.04.01</b>	<b>Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	<b>108.542.830,00</b>
<b>8.2.04.01.01</b>	<b>Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian</b>	<b>108.542.830,00</b>
8.2.04.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Musik	108.542.830,00
<b>8.2.06</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>17.135.364,59</b>
<b>8.2.06.01</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>17.135.364,59</b>
<b>8.2.06.01.01</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>17.135.364,59</b>
8.2.06.01.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	17.135.364,59
	<b>JUMLAH BEBAN DAERAH</b>	<b>169.174.059.013,00</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(169.174.059.013,00)</b>

SERANG, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. NANA SUPIANA  
NIP. 197112132000121002



**PROVINSI BANTEN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

**SATKER : SEKRETARIAT DAERAH**

**SUB UNIT BIRO UMUM**

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	583.757.572.158,50	592.720.009.178,49
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(169.174.059.013,00)	(134.117.531.506,99)
3	R/K PPKD	167.197.143.232,00	125.663.780.451,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(915.440.650,08)	(508.685.964,00)
420	KOREKSI KAS	0,00	0,00
425	KOREKSI PIUTANG	0,00	0,00
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
440	KOREKSI ASET TETAP	1.171.031.523,94	(287.707.564,00)
445	KOREKSI ASET LAINNYA	(2.636.704.005,02)	0,00
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0,00	0,00
455	KOREKSI PENDAPATAN	0,00	0,00
460	LAIN-LAIN	550.231.831,00	(220.978.400,00)
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>580.865.215.727,42</b>	<b>583.757.572.158,50</b>

SERANG, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. NANA SUPIANA**  
197112132000121002



**PROVINSI BANTEN**  
**NERACA SALDO SKPD**  
**PER : 31 DESEMBER 2021**

**SATKER : SEKRETARIAT DAERAH**

**SUB UNIT : BIRO UMUM**

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
0.0.00.00.00.0000	Perubahan SAL	0,00	167.285.463.932,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.720.000,00	0,00
1.1.09.05.01.0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
1.1.09.05.01.0002	Panjar	0,00	0,00
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	212.325.995,40	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	191.447.900,00	0,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	23.106.300,00	0,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	224.496.975,00	0,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	0,00	0,00
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	51.350.000,00	0,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	25.280.470.500,00	0,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	285.915.220.784,00	0,00
1.3.01.01.02.0001	Tanah Basah	126.904.132.695,00	0,00
1.3.01.01.03.0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	672.350.000,00	0,00
1.3.01.01.03.0007	Tanah untuk Jalan	36.585.570.622,00	0,00
1.3.01.01.03.0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi	106.570.000,00	0,00
1.3.01.01.03.0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan	2.451.299.296,00	0,00
1.3.02.01.01.0007	Compacting Equipment	0,00	0,00
1.3.02.01.02.0003	Amphibi Dredger	0,00	0,00
1.3.02.01.02.0005	Mesin Proses Apung	80.268.887,00	0,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	1.284.256.400,00	0,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	713.627.591,00	0,00
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00
1.3.02.01.03.0013	Peralatan Selam	64.900.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.780.403.510,00	0,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	15.638.455.924,00	0,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.674.159.701,44	0,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.054.732.366,00	0,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	872.350.800,00	0,00
1.3.02.02.01.0008	Alat Angkutan Kereta Rel	19.458.858,00	0,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	25.563.039,00	0,00
1.3.02.02.02.0003	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	59.643.947,00	0,00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	39.050.000,00	0,00
1.3.02.02.03.0003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	127.808.132,00	0,00
1.3.02.02.04.0002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	129.690.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	19.898.000,00	0,00
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	80.019.022,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	103.364.399,91	0,00
1.3.02.03.02.0006	Perkakas Khusus (Special Tools)	274.741.342,00	0,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	18.866.800,00	0,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	257.178.150,00	0,00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	38.000.000,00	0,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.056.130.877,25	0,00
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen	4.273.500,00	0,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	375.571.964,00	0,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	136.025.567,00	0,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.267.944.876,00	0,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.088.441.468,84	0,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	3.238.223.638,02	0,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	10.564.577.240,32	0,00
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	32.065.400,00	0,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	788.274.307,00	0,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	4.528.748.695,71	0,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	345.456.095,64	0,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.000.130.924,60	0,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	445.440.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	1.497.494.035,64	0,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	501.409.735,00	0,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	592.105.914,00	0,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	123.900.000,00	0,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	112.102.695,00	0,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	200.835.514,00	0,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	1.132.847.055,33	0,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	2.955.237.436,00	0,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	1.835.262.693,91	0,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	79.678.000,00	0,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	27.066.380,00	0,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	2.548.868.767,96	0,00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	19.427.250,00	0,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	78.108.000,00	0,00
1.3.02.06.02.0007	Alat-Alat Sandi	93.272.900,00	0,00
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	131.193.000,00	0,00
1.3.02.06.03.0006	Peralatan Antena MF/MW	252.337.800,00	0,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	36.394.600,00	0,00
1.3.02.06.03.0015	Peralatan Microwave FPU	16.536.017,00	0,00
1.3.02.06.03.0020	Switcher/Menara Antena	249.954.100,00	0,00
1.3.02.06.03.0021	Feeder	7.392.800,00	0,00
1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi	17.953.000,00	0,00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	376.588.941,66	0,00
1.3.02.07.01.0019	Alat Kedokteran Nuklir	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	104.876.400,00	0,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	107.208.072,60	0,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	32.479.900,00	0,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	4.478.917.566,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.02.08.01.0045	Alat Laboratorium Oseanografi	10.960.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	30.250.000,00	0,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	274.550.771,00	0,00
1.3.02.08.02.0003	General Laboratory Tool	3.142.340,68	0,00
1.3.02.08.02.0005	Laboratory Safety Equipment	124.906.150,00	0,00
1.3.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	20.017.443,00	0,00
1.3.02.08.03.0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	100.020.000,00	0,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	2.927.925,00	0,00
1.3.02.08.03.0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	13.903.940,00	0,00
1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	81.075.000,00	0,00
1.3.02.08.03.0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN	23.323.144,52	0,00
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	44.850.000,00	0,00
1.3.02.08.07.0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	0,00	0,00
1.3.02.08.08.0003	Data Acquisition and Analyzing System	189.990.000,00	0,00
1.3.02.08.08.0004	Cavitation Tunnel	104.168.154,48	0,00
1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	3.150.000,00	0,00
1.3.02.09.04.0004	Peralatan Deteksi Intel	697.776.422,33	0,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	281.200.800,00	0,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	7.906.367.235,54	0,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	270.400.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	207.882.197,00	0,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	60.640.000,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	2.382.254.953,10	0,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	1.057.594.986,00	0,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	10.000.000,00	0,00
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	78.450.000,00	0,00
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	3.571.071,00	0,00
1.3.02.19.01.0004	Peralatan Olahraga Air	3.080.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	126.112.303.010,60	0,00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	371.063.360,00	0,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	68.200.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	183.628.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	148.500.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	543.704.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.923.081.839,00	0,00
1.3.03.01.01.0036	Taman	157.974.910,00	0,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	17.341.881.352,00	0,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	37.523.000,00	0,00
1.3.03.04.01.0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi	175.039.000,00	0,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	682.924.000,00	0,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	2.202.603.000,00	0,00
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	149.000.000,00	0,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	376.800.000,00	0,00
1.3.04.02.05.0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	591.400.200,00	0,00
1.3.04.02.07.0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor	148.900.000,00	0,00
1.3.04.03.01.0003	Instalasi Air Tanah Dalam	38.621.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.04.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	200.299.999,98	0,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	556.070.300,00	0,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	95.410.000,00	0,00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	272.712.000,00	0,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	199.373.820,00	0,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	945.559.150,00	0,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	79.750.000,00	0,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	412.207.000,00	0,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	370.205.404,89	0,00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	10.842.650,00	0,00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	103.865.173,00	0,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	116.032.921,99	0,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	6.301.470,00	0,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	2.757.500,00	0,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	29.789.824,90	0,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	828.850,00	0,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	178.753.950,00	0,00
1.3.05.01.01.0011	Buku Laporan	144.150.000,00	0,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	2.016.500,00	0,00
1.3.05.01.03.0002	Naskah (Manuskrip)/Asli	22.250.000,00	0,00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	4.571.786.264,00	0,00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	306.097.101,10	0,00
1.3.05.02.01.0003	Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00
1.3.05.02.02.0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	107.779.803,53	0,00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan	214.300.900,00	0,00
1.3.07.01.01.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment	0,00	0,00
1.3.07.01.01.0013	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	(64.900.000,00)	0,00
1.3.07.01.01.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Amphibi Dredger	0,00	0,00
1.3.07.01.01.0017	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	(80.268.887,04)	0,00
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(415.880.188,55)	0,00
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(215.747.720,86)	0,00
1.3.07.01.01.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	12.999.999,99	0,00
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(19.992.087.170,17)	0,00
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(28.471.373.207,47)	0,00
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(2.377.830.167,36)	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(2.044.614.699,33)	0,00
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(396.270.000,00)	0,00
1.3.07.01.02.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	0,03	0,00
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(24.178.358,00)	0,00
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(39.050.000,00)	0,00
1.3.07.01.02.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	(127.808.132,00)	0,00
1.3.07.01.02.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	(129.690.000,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.03.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	(80.019.022,00)	0,00
1.3.07.01.03.0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	(274.741.342,00)	0,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(5.594.612,50)	0,00
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(254.664.816,68)	0,00
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	(38.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.04.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(19.898.000,00)	0,00
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(1.036.200.344,03)	0,00
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(375.571.964,00)	0,00
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(136.025.567,00)	0,00
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(1.267.944.876,00)	0,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(2.370.104.213,96)	0,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(4.750.895.707,79)	0,00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(9.262.102.772,20)	0,00
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(32.065.400,00)	0,00
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(568.180.090,32)	0,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(4.189.664.195,77)	0,00
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(403.397.855,25)	0,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(10.146.916.741,04)	0,00
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(235.784.625,00)	0,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(1.412.635.206,89)	0,00
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(351.558.139,99)	0,00
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(460.708.435,00)	0,00
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(85.245.833,30)	0,00
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(206.337.674,00)	0,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	(82.509.134,00)	0,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(1.311.100.832,33)	0,00
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(92.469.735,02)	0,00
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(1.759.820.285,91)	0,00
1.3.07.01.06.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	(1.921.896.743,16)	0,00
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(29.922.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(2.927.925,00)	0,00
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(4.452.428.646,75)	0,00
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(19.427.250,00)	0,00
1.3.07.01.06.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	(7.550.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	(47.655.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	(78.108.000,00)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.06.0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	(22.350.000,00)	0,00
1.3.07.01.06.0032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU	(16.536.017,00)	0,00
1.3.07.01.06.0036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher Antena	(502.291.900,00)	0,00
1.3.07.01.06.0038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Feeder	(7.392.800,00)	0,00
1.3.07.01.07.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	1.980.000,00	0,00
1.3.07.01.07.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	(19.920.000,00)	0,00
1.3.07.01.07.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	(376.588.941,66)	0,00
1.3.07.01.07.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	17.490.000,00	0,00
1.3.07.01.07.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	(17.953.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(1.500.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(43.394.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	(15.015.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(19.194.232,00)	0,00
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(61.482.400,00)	0,00
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(107.208.072,60)	0,00
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(120.806.150,00)	0,00
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	59.282.400,00	0,00
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(15.000.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	(41.474.329,00)	0,00
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(4.672.042.866,00)	0,00
1.3.07.01.08.0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	(10.960.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	(20.453.125,00)	0,00
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(274.550.771,00)	0,00
1.3.07.01.08.0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	1.492.800,00	0,00
1.3.07.01.08.0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(20.017.443,00)	0,00
1.3.07.01.08.0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(100.020.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(224.511.550,00)	0,00
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	4.560.000,00	0,00
1.3.07.01.08.0076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	(13.903.940,00)	0,00
1.3.07.01.08.0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(81.392.340,68)	0,00
1.3.07.01.08.0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(13.421.071,00)	0,00
1.3.07.01.08.0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	(47.033.432,58)	0,00
1.3.07.01.08.0103	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment	(17.490.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	0,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.01.08.0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	(189.990.000,00)	0,00
1.3.07.01.08.0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	(2.203.556.121,81)	0,00
1.3.07.01.09.0012	Akumulasi Penyusutan Non Senjata API -non senjata Api	(66.083.095,83)	0,00
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(348.029.125,00)	0,00
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(7.356.777.360,55)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	(204.185.322,00)	0,00
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(1.589.930.526,27)	0,00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(573.207.967,30)	0,00
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(829.167.482,00)	0,00
1.3.07.01.15.0010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(2.500.000,00)	0,00
1.3.07.01.19.0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	(16.762.500,00)	0,00
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(61.615.144.572,92)	0,00
1.3.07.02.01.0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	(89.746.672,67)	0,00
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(3.410.000,00)	0,00
1.3.07.02.01.0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(137.651.235,00)	0,00
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(32.793.750,00)	0,00
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(142.376.754,16)	0,00
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(2.121.712,19)	0,00
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(7.898.745,50)	0,00
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(146.368.465,25)	0,00
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(4.928.928.544,10)	0,00
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	(26.422.445,83)	0,00
1.3.07.02.04.0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(8.751.950,00)	0,00
1.3.07.02.04.0003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	(116.802.179,16)	0,00
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(34.146.200,00)	0,00
1.3.07.03.01.0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(223.576.000,00)	0,00
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(1.229.221.550,01)	0,00
1.3.07.03.01.0012	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	(211.833.333,33)	0,00
1.3.07.03.02.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	(134.720.833,33)	0,00
1.3.07.03.02.0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	(177.656.806,48)	0,00
1.3.07.03.02.0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	(278.838.298,52)	0,00
1.3.07.03.02.0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(60.035.932,92)	0,00
1.3.07.03.02.0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	(45.910.833,33)	0,00
1.3.07.03.02.0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor	(7.445.000,00)	0,00
1.3.07.03.03.0003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	(11.747.220,84)	0,00
1.3.07.03.03.0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya	(32.917.983,33)	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
1.3.07.03.03.0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	(675.369.208,34)	0,00
1.3.07.03.03.0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(50.909.583,12)	0,00
1.3.07.03.03.0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	(100.502.768,75)	0,00
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(67.184.541,67)	0,00
1.3.07.03.03.0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(25.033.868,75)	0,00
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	(9.968.691,00)	0,00
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(98.885.885,20)	0,00
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(3.987.500,00)	0,00
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	(107.274.829,17)	0,00
1.3.07.03.04.0010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah	(20.610.350,00)	0,00
1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	(1.085.311.979,88)	0,00
1.5.03.01.01.0005	Software	599.528.200,00	0,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	4.857.946.050,00	0,00
1.5.04.01.01.0003	Aset Rusak Berat/Usang Peralatan dan Mesin	3.692.522.505,00	0,00
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(549.989.814,58)	0,00
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat / Usang	(5.899.820.519,19)	0,00
2.1.01.02.01.0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21	0,00	0,00
2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2.1.01.08.01.0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
2.1.06.01.01.0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0030	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0035	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
2.1.06.02.01.0053	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	208.789.622,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggungan	0,00	9.606.501,00
2.1.06.02.02.0626	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0627	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00
2.1.06.02.02.0941	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
2.1.06.02.03.0579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman	0,00	0,00
2.1.06.07.05.0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
2.1.06.07.05.0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00
2.1.06.07.05.0013	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00
2.1.06.07.05.0014	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00
2.1.06.07.05.0019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi	0,00	0,00
2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	(270.400.000,00)
2.1.06.07.10.0003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	270.400.000,00
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	0,00	583.757.572.158,50
3.1.01.01.02.0009	Koreksi atas Aset Peralatan dan Mesin	0,00	(571.305.799,80)
3.1.01.01.02.0012	Koreksi atas Aset Tetap Lainnya	0,00	(21.956.856,00)
3.1.01.01.02.0016	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset tetap	0,00	1.764.294.179,74
3.1.01.01.02.0017	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(2.636.704.005,02)
3.1.01.01.02.0023	Mutasi Masuk	0,00	1.666.665.051,00
3.1.01.01.02.0024	Mutasi Keluar	0,00	(1.116.433.220,00)
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	167.197.143.232,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	19.642.676.700,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.941.381.716,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.277.335.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	481.824.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	654.915.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.121.134.020,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.393.410,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	262.062,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.261.698.762,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	40.397.694,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	121.190.058,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	66.730.500.238,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	144.000.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.599.472.500,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	286.520.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	150.700.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.904.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.396.611,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.600,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.588.800,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	142.560,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	349.920,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	10.151.158.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	587.420.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.240.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	35.768.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.503.639.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	142.750.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	656.084.420,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	882.462.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	356.040.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	95.475.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	29.775.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.514.378.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	89.529.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.757.095.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	284.881.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	928.585.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.210.764.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	767.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.784.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	7.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.650.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.859.260.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.981.230.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.766.532.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.843.605.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	845.260.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	416.096.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	189.440.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	32.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	80.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.167.631.922,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	191.956.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	120.182.215,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.280.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	283.001.034,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.441.557,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	375.787.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	86.734.500,00	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	68.651.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.540.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	62.865.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	252.840.908,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	65.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.600.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	291.675.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	267.326.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	44.500.500,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	94.019.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	195.342.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	98.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.451.049.223,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Beroda Dua	271.186.100,00	0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Khusus	416.442.700,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	18.815.500,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.003.050,00	0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	64.405.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	173.328.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.250.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	81.482.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.782.132.890,00	0,00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	28.078.200,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	248.212.980,00	0,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	7.500.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	4.575.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	4.650.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	4.425.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.307.972.468,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.222.654.978,00	0,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	8.174.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	53.750.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	210.536.170,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	207.382.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	62.025.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.241.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	69.206.930,00	0,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	174.203.700,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	39.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	58.113.000,00	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	44.850.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	723.216.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.100.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.534.794.556,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.915.000,00	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	32.642.500,00	0,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	19.642.676.700,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.941.381.716,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	1.277.335.000,00	0,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	481.824.000,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	654.915.000,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	1.121.134.020,00	0,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41.393.410,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	262.062,00	0,00
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	2.261.698.762,00	0,00
8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	40.397.694,00	0,00
8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	121.190.058,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	66.730.500.238,00	0,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	144.000.000,00	0,00
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.599.472.500,00	0,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	286.520.000,00	0,00
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	150.700.000,00	0,00
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00	0,00
8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.904.000,00	0,00
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00
8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	0,00
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.396.611,00	0,00
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.600,00	0,00
8.1.01.05.07.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.588.800,00	0,00
8.1.01.05.08.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	142.560,00	0,00
8.1.01.05.09.0001	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	349.920,00	0,00
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	10.151.158.700,00	0,00
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	587.420.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	39.240.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	35.768.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	6.375.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.282.606.780,00	0,00
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	98.284.900,00	0,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.050.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	388.564.395,00	0,00
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	733.803.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	345.880.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	95.475.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	29.775.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.507.783.000,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	92.873.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.757.095.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	284.881.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	928.585.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.210.764.500,00	0,00
8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	767.050.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.500.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.784.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	7.750.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	15.500.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.650.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.859.260.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	10.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.981.230.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.766.532.500,00	0,00
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.843.605.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	845.260.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	416.096.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	189.440.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	32.800.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	80.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.226.420.711,00	0,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	191.956.500,00	0,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	129.788.716,00	0,00
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	17.280.000,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	283.001.034,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	42.441.557,00	0,00
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	530.347.912,33	0,00
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.800.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	86.734.500,00	0,00
8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	68.651.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.540.000,00	0,00
8.1.02.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	62.865.000,00	0,00
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	215.663.137,26	0,00
8.1.02.02.05.0002	Beban Sewa Bangunan Gudang	108.294.805,00	0,00
8.1.02.02.05.0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	12.600.000,00	0,00
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	291.675.000,00	0,00
8.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	267.326.000,00	0,00
8.1.02.02.08.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00
8.1.02.02.09.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	94.019.000,00	0,00
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	97.671.000,00	0,00
8.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	98.000.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.451.049.223,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	271.186.100,00	0,00
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	416.442.700,00	0,00
8.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	18.815.500,00	0,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.003.050,00	0,00
8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	64.405.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	173.328.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.250.000,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	81.482.000,00	0,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.421.107.160,00	0,00
8.1.02.03.03.0013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	28.078.200,00	0,00
8.1.02.03.03.0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	197.684.380,00	0,00
8.1.02.03.05.0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	7.500.000,00	0,00
8.1.02.03.05.0002	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	4.575.000,00	0,00
8.1.02.03.05.0003	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	4.650.000,00	0,00
8.1.02.03.05.0004	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	4.425.000,00	0,00
8.1.02.03.05.0012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	1.500.000,00	0,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.307.972.468,00	0,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.222.654.978,00	0,00
8.1.08.01.01.0001	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	4.358.000,00	0,00
8.2.01.01.03.0004	Beban Penyusutan Electric Generating Set	132.993.162,50	0,00
8.2.01.01.03.0005	Beban Penyusutan Pompa	72.873.581,67	0,00
8.2.01.02.01.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	735.879.690,94	0,00
8.2.01.02.01.0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	700.008.133,50	0,00
8.2.01.02.01.0003	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	123.476.202,26	0,00
8.2.01.02.01.0004	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.588.250,00	0,00
8.2.01.02.01.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel	455.495,54	0,00
8.2.01.03.03.0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	1.966.250,00	0,00
8.2.01.03.03.0007	Beban Penyusutan Universal Tester	3.922.083,33	0,00
8.2.01.03.03.0010	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	1.187.500,00	0,00
8.2.01.04.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	13.823.171,80	0,00
8.2.01.05.01.0003	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	10.965.625,00	0,00
8.2.01.05.01.0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	220.377.619,06	0,00
8.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	73.815.092,44	0,00
8.2.01.05.02.0001	Beban Penyusutan Mebel	414.358.358,08	0,00
8.2.01.05.02.0003	Beban Penyusutan Alat Pembersih	19.479.775,00	0,00
8.2.01.05.02.0004	Beban Penyusutan Alat Pendingin	158.657.687,50	0,00
8.2.01.05.02.0005	Beban Penyusutan Alat Dapur	3.882.725,00	0,00
8.2.01.05.02.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.324.658,55	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.2.01.05.02.0007	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	7.462.500,00	0,00
8.2.01.05.03.0001	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	15.767.372,08	0,00
8.2.01.05.03.0002	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	35.526.175,00	0,00
8.2.01.05.03.0003	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	12.387.500,00	0,00
8.2.01.05.03.0004	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	30.975.000,00	0,00
8.2.01.05.03.0006	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	28.912.500,00	0,00
8.2.01.05.03.0007	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	2.421.375,00	0,00
8.2.01.06.01.0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	87.852.705,00	0,00
8.2.01.06.01.0002	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	9.715.050,00	0,00
8.2.01.06.02.0001	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	48.338.468,72	0,00
8.2.01.08.01.0051	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	3.562.500,00	0,00
8.2.01.09.02.0002	Beban Penyusutan Non Senjata API -non senjata Api	6.054.158,33	0,00
8.2.01.10.01.0002	Beban Penyusutan Personal Computer	199.169.312,48	0,00
8.2.01.10.02.0001	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	2.112.500,00	0,00
8.2.01.10.02.0002	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	11.160.000,00	0,00
8.2.01.10.02.0003	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	151.661.933,34	0,00
8.2.01.10.02.0004	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	13.615.000,00	0,00
8.2.01.15.03.0002	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	2.500.000,00	0,00
8.2.01.19.01.0002	Beban Penyusutan Peralatan Permainan	7.450.000,00	0,00
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	5.961.552.148,89	0,00
8.2.02.01.01.0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	18.553.168,00	0,00
8.2.02.01.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.410.000,00	0,00
8.2.02.01.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	9.181.400,00	0,00
8.2.02.01.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	7.425.000,00	0,00
8.2.02.01.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	27.185.200,00	0,00
8.2.02.01.01.0036	Beban Penyusutan Taman	7.898.745,50	0,00
8.2.02.01.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	146.368.465,25	0,00
8.2.02.01.02.0001	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	861.014.067,60	0,00
8.2.02.01.02.0003	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	1.876.150,00	0,00
8.2.02.04.01.0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	8.751.950,00	0,00
8.2.02.04.01.0004	Beban Penyusutan Pagar	34.146.200,00	0,00
8.2.03.01.01.0009	Beban Penyusutan Jalan Khusus	173.102.700,00	0,00
8.2.03.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	7.450.000,00	0,00
8.2.03.02.04.0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	18.840.000,00	0,00
8.2.03.02.05.0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	29.570.010,00	0,00
8.2.03.02.07.0005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	7.445.000,00	0,00
8.2.03.03.01.0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	1.931.050,00	0,00
8.2.03.03.05.0009	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	10.014.999,96	0,00
8.2.03.03.06.0001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	27.803.515,00	0,00
8.2.03.03.06.0003	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	4.770.500,00	0,00
8.2.03.03.09.0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	13.635.600,00	0,00
8.2.03.04.01.0001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	9.968.691,00	0,00
8.2.03.04.02.0001	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	47.277.957,50	0,00
8.2.03.04.02.0002	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	3.987.500,00	0,00
8.2.03.04.03.0001	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah	20.610.350,00	0,00

Kode	Nama Akun	Debet	Kredit
8.2.04.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Musik	108.542.830,00	0,00
8.2.06.01.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	17.135.364,59	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>917.543.134.795,42</b>	<b>917.543.134.795,42</b>

SERANG, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran  


Dr. NANA SUPIANA  
197112132000121002



# PROVINSI BANTEN

## NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : BIRO UMUM

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
1	<b>ASET</b>				
11	<b>ASET LANCAR</b>				
111	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>95.040.700,00</b>	<b>(88.320.700,00)</b>	<b>(92,93)</b>
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.720.000,00	95.040.700,00	(88.320.700,00)	(92,93)
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
112	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	<b>Piutang</b>	<b>212.325.995,40</b>	<b>373.003.941,99</b>	<b>(160.677.946,59)</b>	<b>(43,08)</b>
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130302	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Belanja Dibayar Dimuka	212.325.995,40	373.003.941,99	(160.677.946,59)	(43,08)
11306	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130602	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11307	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130701	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130702	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
117	<b>Persediaan</b>	<b>490.401.175,00</b>	<b>230.912.000,00</b>	<b>259.489.175,00</b>	<b>112,38</b>
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>709.447.170,40</b>	<b>698.956.641,99</b>	<b>10.490.528,41</b>	<b>1,50</b>
12	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
122	<b>Investasi Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>ASET TETAP</b>				
131	Tanah	477.915.613.897,00	477.915.613.897,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	132.823.642.531,48	134.414.605.815,28	(1.590.963.283,80)	(1,18)
133	Gedung dan Bangunan	148.745.822.471,60	142.723.173.285,60	6.022.649.186,00	4,22
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.268.706.469,98	5.300.506.269,98	968.200.200,00	18,27
135	Aset Tetap Lainnya	5.973.457.413,41	5.865.024.689,41	108.432.724,00	1,85
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	214.300.900,00	214.300.900,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(194.267.565.424,68)	(184.853.469.293,60)	(9.414.096.131,08)	5,09
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>577.673.978.258,79</b>	<b>581.579.755.563,67</b>	<b>(3.905.777.304,88)</b>	<b>(0,67)</b>
14	<b>DANA CADANGAN</b>				
141	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>ASET LAINNYA</b>				
153	Aset Tak Berwujud	49.538.385,42	34.031.250,01	15.507.135,41	45,57
15301	Aset Tak Berwujud (Bruto)	599.528.200,00	563.283.700,00	36.244.500,00	6,43
15302	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(549.989.814,58)	(529.252.449,99)	(20.737.364,59)	3,92
154	Aset Lain-lain	2.650.648.035,81	1.594.829.535,83	1.055.818.499,98	66,20
15401	Aset Lain-lain (Bruto)	8.550.468.555,00	4.857.946.050,00	3.692.522.505,00	76,01
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(5.899.820.519,19)	(3.263.116.514,17)	(2.636.704.005,02)	80,80
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>2.700.186.421,23</b>	<b>1.628.860.785,84</b>	<b>1.071.325.635,39</b>	<b>65,77</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>581.083.611.850,42</b>	<b>583.907.572.991,50</b>	<b>(2.823.961.141,08)</b>	<b>(0,48)</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>				
21	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	218.396.123,00	150.000.833,00	68.395.290,00	45,60
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>218.396.123,00</b>	<b>150.000.833,00</b>	<b>68.395.290,00</b>	<b>45,60</b>
22	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
221	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>218.396.123,00</b>	<b>150.000.833,00</b>	<b>68.395.290,00</b>	<b>45,60</b>
3	<b>EKUITAS</b>				
31	<b>EKUITAS</b>				
311	Ekuitas	580.865.215.727,42	583.757.572.158,50	(2.892.356.431,08)	(0,50)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>580.865.215.727,42</b>	<b>583.757.572.158,50</b>	<b>(2.892.356.431,08)</b>	<b>(0,50)</b>

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2021	2020	Jumlah	%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	581.083.611.850,42	583.907.572.991,50	(2.823.961.141,08)	(0,48)

SERANG, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. NANA SUPIANA  
197112132000121002